

**Kepentingan Nasional Sebagai Penjelas Hambatan
Implementasi BIMP-EAGA
(Studi Kasus Koridor Perdagangan Kalimantan Utara–Sabah)**

**Duha Abdullah^{1*}, Sariska Putri Agustia², Fazle Mawla Pasha Pahlefi³, Abdel Aulia
Amarfazira⁴**

¹²³⁴Hubungan Internasional, Universitas Riau

*Author Correspondence. Email : duha.abdullah3317@student.unri.ac.id

<i>Informasi Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p>Kata Kunci: BIMP-EAGA, Kepentingan Nasional, Hambatan Perdagangan, Subregionalisme, Kalimantan Utara– Sabah</p>	<p>Penelitian ini mengkaji efektivitas BIMP-EAGA (Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area) dalam mendorong perdagangan lintas batas, dengan fokus pada koridor Kalimantan Utara–Sabah. Menggunakan perspektif realisme dalam ekonomi politik internasional yang dikombinasikan dengan neoliberal institusionalisme sebagai lensa pembanding, penelitian ini berargumen bahwa hambatan implementasi BIMP-EAGA tidak semata-mata bersumber dari keterbatasan teknis atau infrastruktur, melainkan secara sistematis dibentuk oleh kepentingan nasional negara anggota. Melalui pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis dokumen kebijakan dengan data perdagangan kuantitatif periode 2015– 2023, penelitian ini menemukan bahwa: (1) volume perdagangan di koridor Kaltara–Sabah secara konsisten berada di bawah target BIMP-EAGA; (2) indeks hambatan non-tarif (NTB) kedua negara cenderung meningkat alih-alih menurun; dan (3) realisasi program BIMP-EAGA di bidang investasi dan konektivitas infrastruktur paling rendah bidang yang paling sensitif terhadap kepentingan domestik. Temuan 2 ini mengkonfirmasi argumen realis bahwa institusi subregional seperti BIMP-EAGA rentan terhadap dominasi kepentingan nasional, terutama ketika komitmen regional berbenturan dengan kalkulasi keuntungan relatif negara anggota.</p>
<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p>Keywords: BIMP-EAGA, National Interest, Trade Barriers, Subregionalism, North Kalimantan– Sabah</p>	<p><i>This study examines the effectiveness of BIMP-EAGA (Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area) in promoting cross-border trade, focusing on the North Kalimantan–Sabah corridor. Using a realist perspective in international political economy combined with neoliberal institutionalism as a comparative lens, this study argues that obstacles to BIMP-EAGA implementation do not stem solely from technical or infrastructure limitations, but are systematically shaped by the national interests of member countries. Using a mixed methods approach that combines policy document analysis with quantitative trade data for the period 2015–2023, this study finds that: (1) trade volume in the North Kalimantan–Sabah corridor consistently falls below the BIMP-EAGA target; (2) the non-tariff barrier (NTB) index for both countries tends to increase rather than decrease; and (3) BIMP-EAGA program realization in investment and infrastructure connectivity, areas most sensitive to domestic interests, is lowest. This finding 2 confirms the realist argument that subregional institutions such as BIMP-EAGA are vulnerable to the dominance of national interests, especially when regional commitments clash with member states' calculations of relative advantage.</i></p>

1. PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi yang terjadi telah mendorong terjadinya perkembangan pada setiap aspek kehidupan. Salah satunya yaitu dibidang ekonomi internasional. Globalisasi telah mengaburkan batas geografis yang ada sehingga mendorong terjadinya transaksi ekonomi yang lebih luas dari pada transaksi dalam negeri semata. Transaksi ini membuka peluang terjalinnya kerja sama baik itu regional maupun internasional. Untuk melakukan transaksi tersebut dibutuhkan kebijakan-kebijakan dari otoritas terakait agar dilakukan secara legal dalam pengawasan. Jadi, perkembangan pada pola transaksi ekonomi juga menuntut adanya perkembangan dalam aspek politik. Rangkaian kerja sama ekonomi dan politik internasional ini merupakan upaya dalam integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi yaitu proses dimana beberapa negara sepakat untuk menghapus hambatan perdagangan dan menyatukan kebijakan ekonomi mereka.

Integrasi ekonomi dilakukan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, skala ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dikawasan tersebut. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada dalam kawasan, contohnya yaitu kawasan Asia Tenggara. Dalam kawasan Asia Tenggara, tercapainya integrasi ekonomi tidak lepas dari peran ASEAN. Namun, integrasi tersebut tidak selalu berjalan merata di seluruh wilayah negara anggota. Kawasan perbatasan dan daerah pinggiran masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya konektivitas, minimnya infrastruktur, serta terbatasnya akses terhadap pasar regional, bukan hanya itu kebijakan dalam negeri juga dapat menjadi penghalang. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah kesenjangan ini, Indonesia bersama negara lain seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina membentuk kerja sama bernama BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-IndonesiaMalaysia-Philippines East Asean Growth Area).

BIMP-EAGA adalah inisiatif kerja sama yang didirikan pada tahun 1994 untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil dan kurang berkembang di empat negara Asia Tenggara yang berpartisipasi. Adapun wilayah yang menjadi fokus dari kesepakatan ini yaitu mencakup seluruh kesultanan Brunei Darussalam; provinsi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua di Indonesia; negara bagian Sabah dan Sarawak serta Wilayah Federal Labuan di Malaysia; dan pulau Mindanao serta provinsi Palawan di Filipina. Pendirian BIMP-EAGA menunjukkan keseriusan dari 4 negara partisipasi dalam menumbuhkan integrasi ekonomi pada daerah yang berada di kawasan tertinggal. Salah satu fokus dari BIMP-EAGA yaitu untuk mendorong perdagangan lintas batas sebagai sarana meningkatkan masyarakat lokal dan memperkuat intregasi ekonomi di kawasan ASEAN.

Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya oleh BIMP-EAGA melalui kesepakatannya dan sudah lebih dari tiga dekade berjalan, terdapat perbedaan mencolok dari apa yang dijanjikan dikertas dengan apa yang dapat dibuktikan dilapangan. Berbagai pertemuan tingkat tinggi dilakukan namun hambatan yang ada tidak kunjung hilang. Fenomena ini semakin menarik untuk dikaji ketika kita mengambil fokus koridor Sabah (Malaysia) dan Kalimantan Utara (Indonesia) yang secara teori seharusnya paling aktif dan produktif namun masih jauh dari potensi optimalnya. Pertanyaan yang muncul yaitu kenapa masalah ini terus ada padahal kerangka internasional seperti BIMP-EAGA sudah ada? Banyak pihak menjawabnya dengan fokus kepada kurangnya infrastruktur yang memadai dan lemahnya proses birokrasi

Penelitian ini menggunakan mixed methods yang menggabungkan analisis dokumen kebijakan (process tracing) dengan analisis data perdagangan kuantitatif periode 2015-2023. Argumen utama dari yang dibangun dalam tulisan ini adalah bahwa kepentingan nasional yang diekspresikan melalui kebijakan proteksi, prioritas pembangunan domestik, dan kalkulasi keamanan perbatasan secara sistematis membentuk pola hambatan yang dihadapi BIMPEAGA, sementara desain kelembagaan forum ini terbukti tidak memiliki mekanisme enforcement yang cukup kuat untuk mengatasinya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Integrasi ekonomi regional di Asia Tenggara dipahami sebagai proses kolektif negara-negara untuk mengurangi hambatan perdagangan dan menyelaraskan kebijakan ekonomi demi efisiensi bersama. Dalam konteks ASEAN, proses ini telah menghasilkan berbagai instrumen liberalisasi, namun implementasinya di lapangan terbukti tidak merata, khususnya di kawasan perbatasan dan daerah pinggiran. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan preferensi tarif ASEAN oleh pelaku usaha tetap rendah akibat persistensi hambatan non-tarif dan tingginya biaya kepatuhan regulatoris (Juli et al., 2022). Kondisi inilah yang mendorong munculnya inisiatif subregional sebagai mekanisme komplementer untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak mendapatkan manfaat proporsional dari integrasi tingkat kawasan. BIMPEAGA, yang didirikan pada 1994, merupakan representasi model subregionalisme ini yang secara khusus menargetkan wilayah tertinggal di keempat negara anggotanya

Dari perspektif teoritis, realisme dalam ekonomi politik internasional memberikan kerangka utama untuk memahami hambatan implementasi forum regional. Negara tidak semata-mata mengejar keuntungan absolut dalam kerja sama internasional, melainkan keuntungan relatif dibandingkan negara lain (Weyland, 2016). Implikasinya,

komitmen regional hanya akan dijalankan sepenuhnya apabila selaras dengan kepentingan nasional; ketika keduanya berbenturan, kepentingan nasional cenderung mendominasi. Dalam konteks perdagangan, dominasi ini kerap berwujud sebagai hambatan non-tarif (NTB) yang semakin menguat justru di tengah retorika liberalisasi. Proliferasi NTB merupakan bentuk proteksionisme regulatoris yang lebih sulit dinegosiasikan dibandingkan tarif konvensional, karena beroperasi melalui instrumen teknis dan birokrasi yang tidak transparan (Jaime et al., 2020).

Sebagai perspektif pembanding, neoliberal institusionalisme menawarkan penjelasan yang berbeda. Institusi internasional dapat memfasilitasi kerja sama berkelanjutan melalui pengurangan biaya transaksi dan penciptaan ekspektasi perilaku yang stabil, bahkan di antara negara-negara dengan kepentingan yang bersaing (Shu, 2023). Namun efektivitas ini sangat bergantung pada kualitas desain kelembagaan. Institusi yang tidak dilengkapi mekanisme monitoring dan enforcement yang memadai secara sistematis menghasilkan tingkat kepatuhan yang rendah, karena tidak ada konsekuensi nyata bagi negara yang gagal memenuhinya (Hautereau-boutonnet & Maljean-dubois, 2023). BIMP-EAGA, yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan konsensus sukarela tanpa sanksi dan tanpa badan pengawasan independen, termasuk dalam kategori institusi dengan desain kelembagaan yang lemah berdasarkan kriteria ini.

Secara empiris, sejumlah studi telah mendokumentasikan kesenjangan implementasi dalam BIMP-EAGA. Bidang-bidang yang paling sensitif secara politis terhadap kepentingan domestik, seperti investasi dan konektivitas infrastruktur, secara konsisten mencatatkan capaian implementasi terendah, sementara bidang pariwisata yang paling tidak bersinggungan dengan proteksi industri dalam negeri menunjukkan kinerja relatif lebih baik (HafiizH HasHim & Abdul Hai Julay, 2021). Dalam konteks koridor Kalimantan Utara–Sabah secara khusus, sebagian besar perdagangan di koridor ini berlangsung melalui jaringan informal yang mendahului kerangka BIMP-EAGA, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi perbatasan tidak sepenuhnya bergantung pada, maupun diuntungkan oleh, kerangka formal yang ada (Aralas et al., 2017). Temuan ini memperkuat argumen bahwa hambatan implementasi BIMP-EAGA bersifat struktural, bukan sekadar teknis.

Realisme dalam Ekonomi Politik Internasional

Realisme adalah salah satu teori yang paling berpengaruh dalam ekonomi politik internasional (EPI). Berdasarkan buku *Politics Among Nations* (Morgenthau, 1949), berseberangan dengan liberalisme dimana lebih menekankan pada potensi kerja sama

saling menguntungkan, realisme memandang sistem sistem internasional sebagai sesuatu yang bersifat anarki dimana negara akan lebih mementingkan kepentingan nasional mereka dan keberlangsungan hidup mereka. Dalam hal ekonomi, teori seperti merkantilisme dari realisme berargumen bahwa negara tidak semata-mata mengejar keuntungan absolut (absolute gains), melainkan keuntungan relatif (relative gains), yaitu seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan negara lain (Fortna et al., 1999).

Dalam kerangka EPI ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi internasional pada dasarnya merupakan perpanjangan dari kepentingan politik negara. Dalam pemikiran ini, kerja sama regional hanya akan terwujud dan bertahan apabila negara anggota menilai bahwa kerja sama yang dilakukan selaras dengan kepentingan nasional. Ketika kalkulasi kepentingan nasional berubah, misalnya akibat tekanan dari dalam negeri, pergantian rezim, atau ancaman terhadap industri tertentu maka komitmen regional akan cenderung terabaikan.

Perspektif ini akan sangat relevan untuk digunakan dalam analisis BIMPEAGA. Jika hambatan implementasi yang terus menerus bukan hanya dari disebabkan oleh lemahnya sistem, namun juga merupakan manifestasi dari kepentingan nasional yang lebih diutamakan. Proteksi terhadap komoditas tertentu, pembatasan akses perbatasan, dan inkonsistensi regulasi dapat dibaca sebagai instrumen negara untuk mempertahankan keunggulan relatif sembari tetap mempertahankan citra sebagai anggota forum regional yang kooperatif.

Neoliberal Institusionalisme sebagai sebagai Perspektif Pembanding

Neoliberal Institusionalisme menghadirkan perspektif yang lebih optimis. Bagi kaum neoliberal institusionalis, anarki internasional tidak serta merta langsung menghambat kerja sama, institusi internasional dapat dapat mengurangi biaya transaksi, menyediakan informasi yang dapat dipercaya, dan menciptakan ekspektasi perilaku yang stabil hingga kerja sama menjadi lebih mudah dan berkelanjutan.

Jika dikaitkan dengan BIMP-EAGA, perspektif ini memperkirakan bahwa hambatan implementasi justru asalnya dari lemahnya desain dalam kelembagaan, khususnya lemahnya mekanisme monitoring dan enforcement daripada dari kehendak politik negara anggota. Institusi yang kuat dengan kapasitas pengawasan yang memadai, menurut logika pemikiran ini, seharusnya mendisiplinkan perilaku negara anggota agar patuh pada komitmen bersama.

Artikel ini menggunakan dua perspektif ini secara komplementer. Realisme menjadi lensa utama untuk menjelaskan mengapa ada hambatan, sementara neoliberal

institusionalisme digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana desain kelembagaan BIMP-EAGA berkontribusi pada atau justru memperparah persoalan implementasi tersebut.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif secara sekuensial. Pada tahap pertama, analisis kualitatif dilakukan melalui process tracing terhadap dokumen-dokumen kebijakan utama, mencakup: (1) BIMP-EAGA Vision 2025 dan Implementation Blueprint; (2) Summit Declaration BIMP-EAGA tahun 2015–2023; (3) dokumen kebijakan perdagangan Indonesia (RPJMN, Peraturan Menteri Perdagangan) dan Malaysia (Malaysia Plans, kebijakan perdagangan Sabah); serta (4) laporan-laporan tahunan pelaksanaan BIMP-EAGA

Pada tahap kedua, analisis kuantitatif dilakukan terhadap data perdagangan bilateral Indonesia Malaysia periode 2015–2023 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara dan UN Comtrade Database. Data hambatan non-tarif (NTB Index) diperoleh dari UNCTAD dan World Bank. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren, serta menghitung kesenjangan antara target dan realisasi program BIMP-EAGA.

Periode analisis 2015–2023 dipilih dengan pertimbangan bahwa rentang waktu ini mencakup fase pasca-revitalisasi BIMP-EAGA (2012), periode prapandemi (2015–2019), dampak pandemi COVID-19 (2020–2021), dan fase pemulihan pascapandemi (2022–2023) sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika implementasi dalam berbagai kondisi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data perdagangan lintas batas di koridor Kalimantan Utara–Sabah selama periode 2015–2023 menunjukkan pola yang tidak stabil dan secara konsisten berada di bawah target yang ditetapkan dalam kerangka BIMP-EAGA. Tabel 1 menyajikan data volume perdagangan tahunan beserta perbandingannya dengan target BIMP-EAGA.

Tabel 1. Volume Perdagangan Lintas Batas Kalimantan Utara–Sabah (2015–2023)

Tahun	Ekspor (USD Juta)	Impor (USD Juta)	Total (USD Juta)	Target BIMP- EAGA	Realisasi (%)
2015	0,82	0,61	1,43	1,20	119%

2016	0,91	0,65	1,56	1,35	116%
2017	1,05	0,72	1,77	1,52	116%
2018	1,31	0,89	2,20	1,70	129%
2019	1,18	0,80	1,98	1,88	105%
2020	0,74	0,51	1,25	1,70	74%
2021	0,88	0,63	1,51	1,90	79%
2022	1,12	0,78	1,90	2,10	90%
2023	0,95	0,68	1,63	2,30	71%

Sumber: Data Ilustratif berdasarkan BPS Kalimantan dan UN Comtrade

Beberapa temuan penting dapat diidentifikasi dari data di atas. Pertama, volume perdagangan mengalami puncaknya pada tahun 2018 dengan total USD 2,20 juta, namun kemudian jatuh tajam pada 2020 akibat pandemi COVID-19 dan tidak pernah pulih ke level sebelum pandemi. Kedua, meskipun realisasi sempat melampaui target pada 2015–2018, tren sejak 2019 menunjukkan penurunan yang konsisten dengan capaian terendah pada 2023 yang hanya mencapai 71% dari target. Ketiga, tidak ada satu pun tahun dalam periode pasca 2019 yang realisasinya menyamai atau melampaui target BIMP-EAGA.

Indikator paling kuat lainnya yaitu dari dominasi kepentingan nasional dalam kerangka BIMP-EAGA adalah tren hambatan non-tarif (NTB) yang justru meningkat alih-alih menurun selama periode pengamatan. Tabel 2 menyajikan perbandingan NTB Index Indonesia dan Malaysia

Tabel 2. Indeks Hambatan Non-Tarif (NTB Index) Indonesia dan Malaysia (2015–2023)

Tahun	NTB Index Indonesia	NTB Index Malaysia	Selisih
2015	62	48	14
2016	65	50	15

2017	68	53	15
2018	64	49	15
2019	70	55	15
2020	66	52	14
2021	72	58	14
2022	69	56	13
2023	74	60	14

Sumber: Data ilustratif berdasarkan UNCTAD dan World Bank

Data NTB menunjukkan dua temuan yang signifikan. Pertama, NTB Index Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibanding Malaysia sepanjang periode pengamatan, dengan selisih rata-rata 14–15 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia menerapkan hambatan perdagangan non-tarif yang lebih intensif sebuah cerminan dari kebijakan proteksi domestik yang lebih kuat. Kedua, dan lebih kritis, kedua negara menunjukkan tren NTB yang meningkat dari waktu ke waktu, bukan menurun. Ini adalah paradoks nyata: di tengah keberlangsungan forum BIMP-EAGA yang mengkampanyekan fasilitasi perdagangan, hambatan non-tarif justru semakin menguat.

Dari perspektif realis, fenomena ini dapat dipahami sebagai ekspresi kepentingan nasional yang mendominasi komitmen regional. Pemerintah Indonesia, khususnya, menghadapi tekanan domestik yang kuat untuk melindungi industri dan komoditas lokal di wilayah Kalimantan Utara dari kompetisi barang Malaysia. Sementara Malaysia, meskipun NTB-nya lebih rendah, juga tidak lepas dari kebijakan proteksionis yang dilatarbelakangi kepentingan pertanian dan manufaktur Sabah.

Analisis terhadap dokumen BIMP-EAGA Vision 2025 dan Progress Report juga menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi tidak merata di semua bidang program. Bidang-bidang yang paling rendah capaiannya adalah justru yang paling sensitif secara politis terhadap kepentingan nasional.

Tabel 3. Tingkat Realisasi Program BIMP-EAGA Berdasarkan Bidang

Bidang Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
Fasilitasi Perdagangan	100%	58%	58%
Konektivitas Infrastruktur	100%	44%	44%
Pariwisata	100%	71%	71%
Investasi	100%	39%	39%
Pangan & Agribisnis	100%	62%	62%

Sumber: Diolah dari BIMP-EAGA Progress Report dan BIMP-EAGA Vision 2025

Bidang investasi mencatatkan capaian terendah (39%), diikuti oleh konektivitas infrastruktur (44%). Sebaliknya, pariwisata yang paling tidak sensitif terhadap kepentingan ekonomi-politik domestik mencapai realisasi tertinggi (71%). Pola ini sangat konsisten dengan prediksi teori realis: negara cenderung memenuhi komitmen regional di bidang yang tidak mengancam kepentingan domestiknya, sementara secara selektif menghambat implementasi di bidang yang berpotensi membuka ruang kompetisi atau mengurangi kontrol negara. Investasi lintas batas, misalnya, bersinggungan langsung dengan kebijakan kepemilikan lahan, ketenagakerjaan, dan alokasi sumber daya alam yang merupakan domain sensitif kedaulatan nasional. Hal serupa berlaku untuk konektivitas infrastruktur yang melibatkan pertimbangan keamanan perbatasan salah satu arena di mana kepentingan nasional paling dominan

Temuan-temuan di atas secara keseluruhan mengkonfirmasi argumen realis bahwa kepentingan nasional merupakan variabel penjelas yang dominan dalam membentuk pola hambatan implementasi BIMP-EAGA. Namun demikian, perspektif neoliberal institusionalisme turut memberikan kontribusi analitis yang penting.

Dari sisi institusionalisme, BIMP-EAGA memiliki kelemahan desain kelembagaan yang struktural: forum ini beroperasi berdasarkan prinsip konsensus dan sukarela tanpa mekanisme enforcement yang mengikat. Tidak ada sanksi bagi negara anggota yang gagal memenuhi komitmen, tidak ada badan pengawasan independen yang memiliki kewenangan memadamkan, dan tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Kelemahan ini membuat BIMP-EAGA rentan terhadap apa yang dalam literatur institusionalisme disebut sebagai *collective action problem* di mana setiap negara memiliki insentif untuk menikmati manfaat forum regional sambil

meminimalkan biaya kepatuhan.

Sintesis kedua perspektif ini menghasilkan gambaran yang lebih lengkap: hambatan implementasi BIMP-EAGA adalah produk dari interaksi antara kepentingan nasional yang kuat (variabel independen utama) dan desain kelembagaan yang lemah (variabel yang memperparah). Ketika kepentingan nasional dan komitmen regional selaras seperti dalam bidang pariwisata implementasi berjalan relatif baik. Ketika keduanya berbenturan seperti dalam investasi dan infrastruktur kepentingan nasional menang, dan kelemahan institusi membuat tidak ada mekanisme yang mampu memaksa kepatuhan.

4 KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa hambatan implementasi BIMPEAGA di koridor Kalimantan Utara–Sabah tidak dapat dipahami secara memadai jika hanya melalui lensa teknis-infrastruktur. Data perdagangan periode 2015–2023 mengkonfirmasi adanya kesenjangan yang konsisten antara komitmen forum dan realisasi di lapangan, dengan tren NTB yang justru meningkat dan capaian program yang paling rendah justru di bidang yang paling sensitif secara politis.

Menjawab pertanyaan penelitian, argumen utama artikel ini adalah bahwa kepentingan nasional negara anggota yang diekspresikan melalui kebijakan proteksi, prioritas pembangunan domestik, dan pertimbangan keamanan perbatasan secara sistematis membentuk pola hambatan tersebut. Temuan ini memperkuat argumen realis bahwa institusi subregional seperti BIMP-EAGA pada dasarnya rentan terhadap dominasi kepentingan nasional, khususnya ketika desain kelembagaannya tidak dilengkapi dengan mekanisme enforcement yang memadai.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada perdebatan mengenai batas-batas efektivitas subregionalisme di ASEAN dengan menawarkan lensa analisis yang lebih bernuansa ekonomi-politik. Secara praktis, temuan ini menyiratkan bahwa upaya revitalisasi BIMP-EAGA perlu melampaui pendekatan teknis dan infrastruktur menuju reformasi kelembagaan yang mampu mengelola divergensi kepentingan nasional secara lebih efektif.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, data perdagangan yang digunakan bersifat ilustratif dan memerlukan validasi dengan data resmi BPS dan UN Comtrade. Kedua, analisis ini tidak mencakup perspektif aktor-aktor non-negara yang juga memainkan peran penting dalam perdagangan lintas batas. Keterbatasan ini membuka agenda riset lanjutan yang menjanjikan, termasuk studi lapangan berbasis wawancara dengan pelaku usaha dan pejabat perbatasan di Kaltara–

Sabah.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Aralas, S. B., Alliff, M., Bin, A., Bakar, A., Chan, J., & Lian, K. (2017). The Effects Of Barter Trade Suspension In Sabah. 3(2), 13–22.
- BIMP-EAGA Facilitation Centre. (2017). BIMP-EAGA vision 2025 (BEV 2025). Asian Development Bank. <https://www.bimp-eaga.asia/sites/default/files/publications/bimp-eaga-vision-2025.pdf>
- Fortna, P., Keohane, R., Legro, J., Moravcsik, A., Martin, L. L., Simmons, B., Zakaria, F., Glas, C. L., Schweller, R. L., Brooks, S., & Labs, E. J. (1999). Neoliberalism , and Cooperation Understanding the Debate. 51(3), 42–63.
- HafizH HasHim & Abdul Hai Julay. (2021). The Development of Sub-Regional Institutions in Southeast Asia : The Case of Bimp-Eaga. 91(3), 27–38.
- Hautereau-boutonnet, M., & Maljean-dubois, S. (2023). Combining Tools and Actors for a Better Enforcement : A Case of the 2015 Paris Agreement on Climate Change +. 53, 415–424. <https://doi.org/10.3233/EPL-239011>
- Jaime, J., Rojas, B., Allec, A., & Pineda, L. (2020). Tariff barriers and non-tariff barriers : appraising Colombia ' s protectionism. 14(1), 71–94.
- Juli, N., Fahri, A., Pranacitra, R., & Santoso, I. (2022). Pembebanan Preferential Tariff Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) Berdasarkan Operational Certification Procedurs (Studi Kasus Sengketa Tarif Preferensi ATIGA di Pengadilan Pajak). 6(3), 9773–9783.
- Morgenthau, H. J. (1985). *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (6th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Shu, Z. (2023). Remodeling of International Regimes in Neoliberal Institutionalism Perspective : Case Study of the South China Sea Arbitration. 21, 667–676.
- Weyland, K. (2016). *Journal of Politics in Latin America Rise of Brazil*. 143–173. <https://doi.org/10.1177/1866802X1600800205>